

NEOKOLONIALISME LAWAN TATA EKONOMI DUNIA BARU

Kirdi DIPOYUDO

Sesudah Perang Dunia II dunia mengalami suatu transformasi mendalam yang lambat laun akan mengubah perimbangan kekuatan global dan menciptakan dunia baru yang lebih baik. Di bawah tekanan-tekanan nasionalisme yang laksana taufan melanda negara-negara jajahan dan pendapat umum dunia yang mengutuk kolonialisme serta imperialisme serta menuntut penghapusannya, negara-negara imperialis Barat memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang mereka jajah. Portugal adalah negara penjajah yang lama menentang arus itu, tetapi akhirnya mengalah juga. Negara-negara yang baru merdeka itu segera tampil ke muka sebagai suatu kekuatan baru dalam percaturan politik dunia. Dalam negeri mereka segera mulai pembangunan nasional menuju kemerdekaan ekonomi, dan dalam politik luar negeri mereka bersatu untuk melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dengan maksud itu mereka membentuk Kelompok 77 untuk memperjuangkan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru. Akan tetapi negara-negara industri sekuat tenaga mempertahankan sistem lama yang sangat menguntungkan mereka. Sistem ekonomi internasional lama itu adalah ciptaan dan warisan kolonialisme.

KOLONIALISME

Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara yang memiliki keunggulan militer, teknologi dan ekonomi demi

kepentingan nasionalnya untuk waktu lama menguasai dan memerintah bangsa lain. Kini kolonialisme sudah tidak dikaitkan dengan kolonisasi di mana orang-orang suatu negara menetap di negara lain seperti halnya dengan orang-orang Yunani kuno dan orang-orang Eropa di benua Amerika dan Australia. Kolonialisme kini dianggap sama dengan pemerintahan atas bangsa lain yang mendiami negara lain. Lebih khusus dia berarti pemerintahan negara-negara Eropa atas bangsa-bangsa lain di seberang lautan, terutama di Asia dan Afrika. Ciri-cirinya ialah dominasi oleh suatu minoritas asing atas mayoritas pribumi yang kalah dari segi material; kontak antara peradaban yang berorientasi pada mesin dengan kekuatan ekonomi yang besar dan irama hidup yang cepat dan peradaban yang tidak memiliki mesin-mesin dan ditandai oleh perekonomian terbelakang dan irama hidup lamban; dan dominasi peradaban yang pertama atas yang kedua,¹

Kolonialisme berhubungan erat dengan perkembangan kapitalisme dan revolusi industri di Eropa, yang mencari bahan mentah bagi industri dan pasaran bagi kelebihan hasilnya. Didorong oleh kebutuhan-kebutuhan itu negara-negara industri Barat melakukan ekspedisi-ekspedisi ke seberang laut, mula-mula untuk berdagang, tetapi kemudian dan untuk lebih menjamin keamanan suplai bahan mentah dan pasaran barang jadi itu serta untuk meningkatkan keuntungan, menaklukkan dan menjajah bangsa-bangsa lain. Sebagai akibatnya terjadi penindasan dan pemerasan bangsa-bangsa jajahan demi kepentingan negara-negara penjajah. Bukan saja seluruh impor dan ekspor koloni-koloni dikuasai penjajah sebagai monopoli, negara-negara jajahan itu juga dilarang memproses bahan mentah dan membangun industri yang dapat menjadi saingan. Perekonomian koloni dijadikan pelengkap perekonomian penjajah. Industri yang telah ada terpaksa gulung tikar. Secara demikian timbul suatu sistem pembagian kerja internasional, yang menempatkan negara-negara jajahan sebagai penghasil dan pengeksport bahan men-

¹ Lebih lanjut lihat Rupert Emerson, "Colonialism. Political Aspects", dalam David L. Sills, Ed., *International Encyclopaedia* (New York — London, 1972), 3, hal. 1-5; dan John P. Plamenatz, *On Alien Rule and Self-Government* (London, 1960)

tah dan pangan dengan harga murah dan pengimpor barang-barang jadi dengan harga tinggi dari negara-negara penjajah. Di samping itu pengakutan barang-barang ekspor mau pun impor mereka hampir seluruhnya di tangan negara-negara penjajah. Dalam keadaan serupa itu penjajah dapat menguras sumber-sumber daya alam jajahan dengan harga murah, mengolahnya menjadi barang jadi, menjual barang-barang itu dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada negara-negara lain dan koloni-koloni, dan secara demikian menjadi makin kaya dan makmur, sedangkan bangsa-bangsa jajahan tetap miskin dan terbelakang. Dalam proses itu perekonomian negara-negara jajahan macet dan bahkan mundur. Itulah salah satu akar pokok kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi setelah mendapatkan kemerdekaan.¹

PROSES DEKOLONISASI

Mula-mula bangsa-bangsa jajahan terpaksa membiarkan dominasi dan pemerasan asing itu karena tidak berdaya menghadapi keunggulan militer dan teknologi penjajah mereka. Akan tetapi kolonialisme itu lambat laun mendapat kecaman semakin keras di negara-negara penjajah itu sendiri. Kritisi yang moderat dapat menerima kolonialisme kalau penguasa-penguasa kolonial berusaha menyiapkan bangsa jajahan mereka untuk kemerdekaan, tetapi karena semakin skeptis terhadap kejujuran negara-negara kolonial menuntut agar diadakan pengawasan internasional. Piagam PBB tahun 1945 mendukung kemerdekaan semua negara jajahan, memperketat pengawasan atas pemerintahan negara-negara perwalian sisa sistem mandat, dan menempatkan semua negara jajahan di bawah kekuasaan internasional. Sebaliknya kritisi yang lebih radikal mengutuk segala pemerintahan asing yang dipaksakan dan menuntut kemerdekaan sebagai satu-satunya penyelesaian. Sebagai hasil perjuangan mereka, bertolak dari resolusi anti kolonial Konperensi Afro-Asia di Bandung tahun 1955, Majelis Umum PBB pada tahun 1960 menerima suatu resolusi yang mengukuhkan pendapat itu dan oleh sebab itu dikenal sebagai Resolusi Dekolonisasi. Deklarasi

¹ Lihat D.K. Fieldhouse, "Colonialism. Economic Aspects", dalam David L. Sills, Ed., *op. cit.*, hal. 6-12; dan Stewart C. Easton, *The Rise and Fall of Western Colonialism* (New York — London, 1964), hal. 3—13

ini mengutuk penaklukan asing bangsa-bangsa sebagai penyanggahan hak-hak asasi dan hambatan perdamaian, menyatakan hak kemerdekaan semua bangsa, dan menolak doktrin perwalian dengan menegaskan bahwa kurangnya persiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh dijadikan dalih untuk menunda-nunda kemerdekaan (lihat lampiran). Pendapat Asia dan Afrika selalu menganut posisi radikal itu dan mengutuk kolonialisme serta imperialisme sebagai sumber kebanyakan masalah di dunia. Negara-negara yang masih mempunyai jajahan didesak agar secepat mungkin memberikan kemerdekaan.¹

Di bawah tekanan pendapat umum dunia yang mengutuk kolonialisme itu dan nasionalisme yang sebagai taufan melanda negara-negara jajahan, negara-negara imperialis Barat mempercepat proses dekolonisasi dan memberikan kemerdekaan kepada koloni-koloni mereka yang belum merdeka. Portugal adalah satu-satunya negara penjajah yang lama menentang arus itu, tetapi menyusul pemberontakan tahun 1974 yang menggulingkan rezim Salazar mengalah juga, khususnya karena pemimpin-pemimpin baru menyadari bahwa dekolonisasi adalah suatu proses sejarah yang tidak dapat dibendung.²

KOLONIALISME GAYA BARU

Akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa kolonialisme telah menjadi sejarah. Yang berakhir barulah kolonialisme gaya lama berupa penjajahan politik atau pemerintahan asing, sedangkan jenis-jenis lain penjajahan masih tetap hidup, khususnya penjajahan ekonomi. Jenis-jenis kolonialisme ini adalah lebih halus, tetapi sama jeleknya karena juga berarti dominasi dan pemerasan asing. Di antaranya terdapat penjajahan ekonomi yang berusaha menguasai bidang-bidang ekonomi, keuangan dan teknik negara lain; penjajahan ideologis yang berusaha

-
- 1 Mengenai proses dekolonisasi lebih lanjut lihat Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise and Self-Assertion of Asian and African Peoples* (Cambridge, Mass., 1960); lihat juga Stewart C. Easton, *op. cit.*, hal. 152-184 dan 366-372
 - 2 Lihat Peter Uebersex, "Self-Determination for Portugal's African Territories". *Indonesian Observer*, 30 Mei 1974; lihat juga Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise and Self-Assertion of Asian and African Peoples* (Cambridge, Mass., 1960)

memaksakan ideologi asing seperti yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap negara-negara di Eropa Timur sesudah Perang Dunia II; dan penjajahan militer yang berusaha memaksakan kehadiran militer asing dengan menempatkan secara paksa pasukan-pasukan serta pangkalan-pangkalan di negara yang lemah atau juga mengerahkan pasukan-pasukan ke negara lain dengan dalih untuk menyelamatkan warganegaranya atau kepentingan-kepentingannya, seperti penyerbuan tentara Soviet ke Cekoslowakia tahun 1968 dan pengerahan pasukan-pasukan Kuba ke berbagai negara di Afrika untuk memperkuat atau memperluas pengaruh merah. Jenis-jenis penjajahan itu adalah kolonialisme gaya baru dan lebih dikenal sebagai neo kolonialisme.¹

Yang paling banyak terdapat dan menonjol ialah penjajahan ekonomi. Negara-negara imperialis Barat memberikan kemerdekaan politik kepada negara-negara jajahan, tetapi tetap menguasai perekonomian mereka, khususnya lewat pola hubungan ekonomi ciptaan jaman kolonial. Hampir semua negara bekas jajahan itu bergantung pada negara-negara bekas penjajah mereka dan negara-negara industri lain untuk ekspor komoditi-komoditi primer mereka maupun untuk impor barang jadi, modal, teknologi dan keahlian manajemen mereka. Keadaan ini adalah akibat perkembangan mereka sebagai jajahan, yang dimaksud untuk menunjang kepentingan ekonomi negara-negara penjajah, sehingga perekonomian mereka macet dan bahkan mundur. Mereka adalah korban pembagian kerja internasional yang menempatkan mereka sebagai penghasil dan pengeksportor bahan mentah dan pangan yang harganya ditekan dan pengimpor barang jadi yang mahal. Selain itu pengangkutan barang-barang ekspor maupun impor itu hampir seluruhnya di tangan negara-negara maju yang oleh sebab itu dapat menentukan biaya yang tinggi. Sebagai akibatnya harga komoditi-komoditi ekspor mereka ditekan lagi dan barang jadi menjadi lebih mahal secara yang menguntungkan negara-negara penjajah. Dengan demikian pada waktu mendapatkan kemerdekaan politik, negara-negara

1 Lihat K. Brutents, *A Historical View of Colonialism* (Moskwa, 1972), hal. 16-38; dan Kwame Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (London, 1965)

jajahan itu miskin dan terbelakang perekonomiannya. Mereka tidak mempunyai modal, teknologi, tenaga-tenaga ahli dan sebagainya untuk melakukan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rendah rakyat mereka masing-masing. Untuk semuanya itu mereka bergantung sama sekali pada negara-negara industri kaya. Mereka berusaha mendapatkannya, tetapi oleh sebab persediaan terbatas dan tidak sebesar kebutuhan maka kedudukan tawar menawar mereka adalah lemah sehingga terpaksa menerima syarat-syarat yang lebih menguntungkan negara pemberi daripada negara penerima. ¹

Pengalaman menyusul dekolonisasi politik menunjukkan bahwa penyaluran modal, teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang tidak memberikan hasil yang diharapkan, tetapi justru memperlebar jurang antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Sekitar 70-80% penduduk dunia yang hidup di Dunia Ketiga hanya memiliki 20-30% kekayaan dunia. Salah satu faktor pokok perkembangan itu ialah "terms of trade" yang sangat merugikan negara-negara berkembang. Negara-negara industri terus menguras bahan-bahan mentah negara-negara berkembang dengan harga serendah mungkin. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam angka-angka produksi baja Jepang, yang meningkat dengan cepat, dari 10 juta ton tahun 1956 menjadi 20 juta ton tahun 1960, 30 juta ton tahun 1963, 40 juta ton tahun 1965 dan sekitar 70 juta ton tahun 1968. Suatu perkembangan yang luar biasa, padahal Jepang tidak mempunyai bahan mentahnya. Hal itu berarti bahwa Jepang menguras bahan-bahan mentah untuk industri bajanya dari negara-negara lain, khususnya negara-negara berkembang. ²

Sebaliknya negara-negara industri memerlukan pasaran bagi barang-barang industri mereka, baik dalam maupun luar negeri. Khususnya Jepang melancarkan suatu kampanye ekspor secara agresif karena produksinya jauh melebihi kebutuhannya

1 Lihat Harry Magdoff, *The Age of Imperialism* (New York - London, 1969); dan K. Brutents, *op. cit.* hal. 38-67 dan 151-192

2 Lihat *Kompas*, 9 September 1975; dan John Halliday dan Gavan McCormack, *Japanese Imperialism Today* (Penguin Books, 1974)

di dalam negeri. Karena harga-harga barang-barang industrinya lebih rendah dibandingkan dengan harga barang-barang negara-negara industri lainnya di Eropa dan Amerika, Jepang berhasil membanjiri negara-negara lain dengan hasil produksinya. Dalam proses itu dia menjadi kaya raya dengan cepatnya karena pendapatan ekspornya jauh lebih besar daripada biaya impornya, sehingga cadangan devisanya setiap tahun meningkat secara luar biasa. Sebagai akibat semuanya itu proses industrialisasi negara-negara berkembang sangat terhambat dan bahkan banyak industri yang telah ada terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang umumnya bersifat neokolonial. Meningkatnya ekspor dan GNP sangat dipengaruhi oleh injeksi bantuan luar negeri yang masif dan volume besar investasi asing yang harus meningkat. Sebagian besar investasi asing itu bersifat neokolonial, artinya dilakukan seperti di jaman kolonial dalam industri-industri ekstraktif seperti perminyakan, pertambangan, dan perikanan. Sebagian ekspor juga merupakan hasil kegiatan itu. Investasi dalam industri manufacturing meliputi tiga jenis pokok, dua di antaranya mempunyai akibat neokolonial. Pertama apa yang disebut investasi "coca cola", yang melayani kesenangan mewah elit asing dan lokal yang kecil. Kedua, industri yang bersaing dengan dan menggantikan barang-barang yang sebelumnya dihasilkan modal dan tenaga kerja lokal, termasuk sebagian investasi dalam pertekstilan, seperti terbukti dalam seruan-seruan pengusaha-pengusaha lokal kepada pemerintah agar dilindungi. Jenis ketiga meliputi industri barang-barang ganti impor seperti obat-obatan, assembling kendaraan bermotor, ban, bahan bangunan dan sebagainya. Investasi industri berpusat di sekitar kota-kota besar dan secara demikian memperlebar jurang gaya hidup dan kekayaan antara kota dan desa. Akhirnya kegiatan ekonomi asing itu sangat padat modal dan tidak dapat diharapkan mengurangi pengangguran secara berarti.¹

¹ Lihat Rex Mortimer, "Indonesia: Growth or Development?", dalam Rex Mortimer, Ed., *The Showcase State. The Illusion of Indonesia's Accelerated Modernization* (Sydney, 1973), hal. 51-66

Seperti investasi asing, demikianpun bantuan luar negeri umumnya berbau neokolonialisme. Bantuan berupa pinjaman yang diberikan itu sebagian besar dengan syarat-syarat dalam arti bahwa pinjaman harus digunakan untuk membeli barang-barang dari negara-negara donor dan untuk proyek-proyek yang harus disetujui dan diawasi oleh pemberi. Selain itu bantuan tersebut kerap kali menghambat perkembangan ekonomi karena dua hal. Pertama, sebagian besar bantuan proyek itu dimaksud untuk memperluas prasarana bagi operasi perusahaan-perusahaan multinasional. Hal itu memperkuat kedudukan ekonomi perusahaan-perusahaan itu, memperbesar tendensi ke arah perkembangan kantong-kantong dan memperkuat trend pembangunan padat modal. Kedua, bantuan yang diberikan itu adalah syarat bagi pengembalian pinjaman-pinjaman yang lebih dahulu dengan bunganya. Dengan perkataan lain, tanpa bantuan baru itu kemungkinan besar bantuan pinjaman lama tidak akan kembali.¹

NEOKOLONIALISME MASIH HIDUP

Neokolonialisme itu masih merupakan masalah yang hangat baik dalam negara berkembang masing-masing maupun pada tingkat internasional dan bahkan secara global. Penjajahan ekonomi masih terjadi di hampir semua negara Dunia Ketiga, biarpun banyak orang tidak menyadarinya. Banyak negara berkembang hanya namanya merdeka dan berdaulat, tetapi kenyataannya secara ekonomis dikuasai dan diperas oleh pemerintah-pemerintah dan perusahaan-perusahaan asing. Negara-negara industri yang kaya, untuk sebagian hasil pemerasan koloni-koloni mereka di masa lampau, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pola hubungan ekonomi jaman kolonial yang sangat menguntungkan mereka tetapi sangat merugikan secara tak adil negara-negara bekas jajahan, dan sejauh ini usaha mereka itu berhasil. Dengan perkataan lain, mereka berhasil

¹ Lebih lanjut lihat Teresa Hayter, *Aid as Imperialism* (Penguin Books, 1974). Penulis membeberkan praktik-praktik bantuan luar negeri, khususnya di Amerika Latin, dan mengutip Presiden Kennedy sebagai mengatakan bahwa "bantuan asing adalah cara Amerika Serikat mempertahankan suatu kedudukan pengaruh dan kekuasaan di dunia"

menguasai perekonomian negara-negara berkembang lewat sistem ekonomi liberal dan investasi dalam investasi pertambangan dan barang-barang konsumsi untuk sebagian kecil masyarakat yang mampu membelinya. Hal itu adalah juga hasil bantuan-bantuan yang mengikat atau diberikan dengan syarat-syarat yang memberatkan negara-negara penerima. Negara-negara ini antara lain harus menganut ekonomi liberal, menggunakan bantuan kredit untuk membeli barang-barang di negara-negara pemberi, menggunakan penasihat-penasihat asing, dan mendapatkan persetujuan pemberi kredit bagi proyek-proyek pembangunan mereka. Secara demikian negara-negara industri kaya dapat menguasai politik pembangunan negara-negara berkembang demi kepentingan-kepentingan mereka. Khususnya mereka berusaha untuk mempertahankan sistem pembagian kerja internasional ciptaan jaman kolonial yang menempatkan mereka sebagai pengimpor bahan mentah dan pangan dengan harga murah dari negara-negara berkembang dan pengeksport barang-barang jadi dengan harga tinggi kepada negara-negara itu, dan sebaliknya menempatkan negara-negara berkembang sebagai penghasil dan pengeksport barang-barang primer serta pengimpor barang-barang industri. Dalam kata-kata negara-negara industri itu mendukung rencana industrialisasi negara-negara Dunia Ketiga dan memberikan bantuan, tetapi kenyataannya mereka menentangnya. Mereka menyadari bahwa industrialisasi negara-negara berkembang akan berarti matinya sebagian industri mereka sendiri, pengangguran dan berkurangnya kemakmuran. Bantuan bagi negara-negara berkembang diberikan demikian rupa sehingga industrialisasi tidak terwujud dan ketergantungan ekonomi mereka pada negara-negara pemberi tidak berkurang, melainkan bertambah. Negara-negara berkembang tidak boleh menjadi negara industri dan menjadi saingan. Mereka harus puas dengan kedudukan mereka sebagai penghasil dan pengeksport komoditi-komoditi primer serta pengimpor barang-barang jadi.

Sejalan dengan itu negara-negara industri juga berusaha mempertahankan kedudukan mereka untuk menentukan harga barang-barang baik impor maupun ekspor mereka. Secara konkrit mereka berusaha mempertahankan harga barang-barang

primer yang mereka impor pada tingkat yang rendah, sedangkan harga barang-barang jadi yang mereka ekspor terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kemakmuran dalam negeri mereka dan upah buruh. Sejauh ini mereka berhasil dalam usaha itu dan "terms of trade" semakin menguntungkan mereka. Hanya mengenai minyak tanah usaha mereka gagal. Setelah harga minyak itu beberapa dasawarsa ditekan, pada tahun 1973 dia meningkat sampai 5 kali berkat perjuangan negara-negara OPEC. Negara-negara industri yang bergantung pada minyak Timur Tengah menjadi berantakan dan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada negara-negara OPEC, tetapi tidak berdaya untuk melawan kenaikan harga itu. "Jaman kemajuan luar biasa dan pendapatan serta kekayaan yang lebih luar biasa yang didasarkan atas minyak murah telah berakhir". Demikian komentar Shah Iran mengenai hal itu. ¹

Didorong oleh sukses negara-negara OPEC itu, banyak negara Dunia Ketiga lainnya berusaha membentuk kartel yang dapat menentukan harganya sendiri bagi bahan-bahan mentah lainnya seperti tembaga, bijih besi, fosfat, karet, kopi, cokelat dan lain sebagainya. Akan tetapi usaha itu sejauh ini tidak memberikan hasil yang diharapkan karena negara-negara yang bersangkutan tidak cukup kompak, sedangkan negara-negara industri yang akan mengalami akibat buruknya berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkannya. Namun arti baru bahan-bahan mentah telah mendorong sementara produsen untuk secara sepihak meningkatkan harga-harga. Misalnya Jamaika membatalkan kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing dan meningkatkan penerimaan negara dari bauksitnya sebanyak 700%. Bagaimanapun juga, dunia telah memasuki suatu jaman di mana kekayaan alam lebih bernilai daripada sebelumnya dan penghematan lebih dihargai daripada pemborosan. ²

Untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup yang telah sangat tinggi, kini 35 kali lebih tinggi dari taraf hidup di negara-negara berkembang, negara-negara industri membutuhkan suplai aman bahan-bahan mentah dan minyak bagi indus-

1 Dikutip dari "Faisal and Oil. Driving Toward a New World Order", *Time*, 6 Januari 1975

2 Lihat "Faisal and Oil. Driving Toward a New World Order", *Time*, 6 Januari 1975; dan karangan "How Strong the New Cartels?" *Newsweek*, 8 September 1975

tri serta pasaran bagi barang-barang industrinya. Dalam rangka itu mereka berusaha mengamankan baik suplai bahan mentah dan bahan bakar serta pengangkutannya maupun pasaran barang-barang jadi itu. Baik Jepang maupun negara-negara Eropa Barat untuk sebagian besar suplai bahan mentah dan bahan bakar bergantung pada negara-negara berkembang Dunia Ketiga, khususnya Timur Tengah dan Afrika. Sehubungan dengan itu mereka berusaha mempertahankan kedudukan mereka untuk menguasai sumber-sumber daya alam kedua kawasan itu dan menangkis perluasan pengaruh Uni Soviet yang dilihat sebagai ancaman. Perebutan pengaruh di Timur Tengah dan Afrika antara blok Timur dan blok Barat yang berlangsung sekarang ini bukanlah semata-mata sengketa Timur-Barat, melainkan juga perebutan sumber-sumber daya alam yang vital bagi negara-negara Barat. Kedua pihak menyadari bahwa keamanan suplai bahan mentah dan bahan bakar dari kedua kawasan itu serta keamanan pengangkutannya merupakan soal mati hidup bagi negara-negara Barat dan Jepang. Kejadian-kejadian di Zaire baru-baru ini merupakan suatu ilustrasi yang baik. Uni Soviet dan Kuba membantu kaum pemberontak Katanga yang menyerbu propinsi Shaba untuk menggulingkan Pemerintah Mobutu yang tidak hanya dianggap tidak kompeten dan korup tetapi juga sebagai kaki tangan Barat dalam pengurusan sumber-sumber daya alam negara itu. Dengan tepat negara-negara Barat melihatnya sebagai ancaman bagi kepentingan-kepentingan vital mereka dan segera turun tangan untuk menyelamatkan Pemerintah Mobutu biarpun kurang senang dengannya. Apabila kaum pemberontak berhasil dan membentuk suatu pemerintah kiri yang pro Moskwa, suplai bahan mentah itu bisa dihentikan.¹

Khususnya hubungan antara Jepang dan negara-negara berkembang, bersifat neokolonial. Hubungan ini menempatkan negara-negara berkembang yang bersangkutan sebagai penghasil dan pengeksport bahan mentah dan bahan bakar dengan harga murah serta pengimpor barang jadi Jepang dengan harga yang tinggi. Memang harus diakui bahwa Jepang bergantung pada negara-negara itu untuk

1 Lihat karangan "Countering the Communists", *Time*, 5 Juni 1978; dan "New Gendarmes in Africa", *Newsweek*, 5 Juni 1978

impor dan eksportnya, tetapi ketergantungannya pada negara berkembang masing-masing adalah tidak sebesar ketergantungan negara-negara berkembang itu pada Jepang. Hubungan itu bersifat asimetris dan merugikan negara-negara berkembang. Dan kalau tidak terpaksa, Jepang tidak akan mengubah pola hubungan itu dan menggantinya dengan pola hubungan baru di mana saling ketergantungan bersifat simetris. Tidak mengherankan bahwa negara-negara berkembang itu merasa diperas oleh Jepang tetapi tidak berdaya untuk menghentikan pemerasan itu karena terlalu bergantung pada Jepang. Sebagai akibatnya timbul rasa benci terhadap Jepang yang bisa mengobarkan aksi-aksi anti Jepang seperti terjadi pada kunjungan PM Tanaka ke beberapa negara ASEAN tahun 1974. Bila ada kesempatan, suatu bangsa yang merasa diperas oleh bangsa lain akan bangkit dan menuntut perubahan¹

Di banyak negara berkembang dominasi dan pemerasan asing dipermudah oleh sekelompok kecil birokrat kapitalis, yang terdiri atas pejabat-pejabat sipil maupun militer, yang berkat kedudukan kunci mereka dalam aparatur politik birokrat dapat memasuki sektor modern ekonomi yang di tangan pemerintah dan lewat manipulasi perusahaan-perusahaan negara, dana-dana pemerintah dan kegiatan bisnis swasta, menumpuk banyak kekayaan dan kekuasaan, kerap kali dalam waktu singkat. Sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan kenyataan-kenyataan ekonomi, mereka berambisi menciptakan bukan perusahaan-perusahaan besar yang jaya melainkan kelompok pengikut dan pangkalan-pangkalan strategis untuk meningkatkan status pribadi mereka dan menuntut hormat dari masyarakat. Orang-orang itu umumnya dikenal hidup mewah, meniru aspek-aspek cara hidup Barat yang kurang konstruktif, melakukan korupsi uang negara dan patronase dalam bidang politik.

Kelas kaya baru ini di sementara negara berkembang menjadi lebih kuat dengan terbukanya kesempatan-kesempatan yang lebih besar berkat masuknya perekonomian asing dan menjadi

¹ Lihat *Antara*, 12 Januari 1974 dan 15 Januari 1975; lihat juga John Halliday dan Gavan McCormack, *op. cit.*, hal. 17-76

semakin berkuasa karena kekuatan-kekuatan politik lainnya ditindas atau dijinakkan. Dengan ambisi untuk memasuki bidang yang dikuasai modal asing mereka menjadi sekutu kekuatan-kekuatan ekonomi asing yang menguasai perekonomian nasional dan memeras bangsa. Dengan mengalirnya bantuan luar negeri dan modal investasi asing, mereka menyatukan kepentingan-kepentingan dan kegiatan-kegiatan mereka dengan kekuatan dan kepentingan asing itu demi keuntungan bersama. Dengan demikian mereka menjadi sekutu perusahaan-perusahaan asing untuk memeras negara mereka sendiri.

Sebagai perantara kepentingan asing mereka paling banyak mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan modal multinasional. Mereka tidak menentang perkembangan ekonomi. Sebaliknya, dalam keadaan boom ekonomi berkat bantuan luar negeri dan investasi asing, mereka senang menjadi pelancar masuknya ekonomi asing dan mendirikan perusahaan-perusahaan di tepi kegiatan bisnis asing. Tetapi sumbangan mereka bagi peningkatan kemampuan negara untuk mengadakan pembaruan-pembaruan di tingkat nasional adalah sangat kecil. Ikatan mereka dengan modal asing, konsentrasi mereka di jalan menuju pengumpulan kekayaan, dan aspirasi mereka akan status dan gengsi, semuanya itu mendorong mereka untuk bercokol dalam kantong-kantong, yang merupakan sektor kecil, modern dan dimanja dari perekonomian negara. Secara demikian mereka memperkuat kecenderungan kepentingan asing dan penasihat-penasihat ekonomi pemerintah untuk proyek-proyek yang besar, modern, mahal dan padat modal. Lambang gambaran mereka mengenai pembangunan ialah rumah-rumah megah, mobil-mobil mewah, kasino-kasino, klub-klub malam, toko-toko penuh sesak dengan barang-barang impor.

Mereka merupakan hambatan utama bagi perkembangan sejati. Di lain pihak tiada kekuatan sosial dan politik yang mampu melawan serangan perusahaan asing dan sekutu-sekutu lokalnya. Pengusaha-pengusaha lokal adalah terlalu lemah jumlah dan skala operasinya, dan dari segi politik impoten, untuk menantang dominasi mereka. Mahasiswa dan cendekiawan disadarkan bahwa peranan mereka terbatas pada kritik loyal. Lagi

pula kultus mereka akan pertumbuhan GNP meningkatkan kelumpuhan dan frustrasi mereka. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi dijinakkan. Rakyat banyak tidak boleh ikut berpolitik dan hanya boleh menyalurkan keluhan dan tuntutan-nya lewat saluran birokrasi yang tidak simpatik. Kekuasaan sangat terpusat, tersusun menurut garis hirarki. Hak-hak, tanggung jawab dan kekuasaan adalah pada kaum birokrat kapitalis tersebut,¹

AKSI MELAWAN NEOKOLONIALISME

Negara-negara berkembang semakin menyadari kepincangan-kepincangan hubungan-hubungan ekonomi internasional itu dan bertekad untuk menggantinya dengan suatu pola hubungan baru yang lebih adil. Dipelopori oleh negara-negara OPEC yang telah berhasil mendapatkan bagian yang lebih besar dari kekayaan minyak mereka, mereka memperjuangkan terbentuknya suatu tata baru dan melancarkan suatu revolusi ekonomi yang telah mulai menghasilkan pembagian kembali kekayaan dunia dan kekuasaan politik. Pemindahan kekayaan kepada negara-negara penghasil minyak telah memperlambat atau menghentikan laju peningkatan taraf hidup di banyak negara maju. Dalam rangka itu pada tahun 1965 mereka membentuk Kelompok 77 yang kini telah beranggotakan 121 negara.

Perjuangan itu makin lama makin kuat dan mencapai salah satu puncaknya dalam Sidang Khusus yang diadakan Majelis Umum PBB pada 9 April — 2 Mei 1974 untuk membicarakan masalah-masalah bahan mentah, pembangunan dan hubungan-hubungan perdagangan dunia, khususnya sehubungan dengan meningkatnya harga barang-barang, termasuk minyak tanah. Pada akhir sidang itu diterima tanpa pemungutan suara dua dokumen, yaitu *Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru* dan *Program Aksi* yang memuat serangkaian tindakan yang mendesak dan efektif yang perlu diambil oleh masyarakat internasional guna membantu negara-negara berkembang. Deklarasi itu memuat 20 asas bagi penyusunan tata

¹ Lihat Rex Mortimer, *op. cit.*, hal. 57-59

baru yang menyangkut sumber-sumber daya alam, perdagangan dan keuangan internasional, perusahaan-perusahaan transnasional, teknologi dan lain sebagainya. Salah satu asas menyatakan "kedaulatan abadi setiap negara atas kekayaan alamnya" dan menegaskan bahwa "setiap negara berhak untuk menguasai secara efektif kekayaan alamnya dan eksploitasinya dengan cara-cara yang selaras dengan situasinya, termasuk hak nasionalisasi atau pemindahan pemilikan kepada warga-warganya". Suatu asas lain yang berkaitan menyatakan bahwa semua negara, wilayah dan bangsa di bawah pendudukan asing, kekuasaan kolonial atau apartheid mempunyai "hak atas ganti rugi dan kompensasi penuh bagi eksploitasi dan pengurusan serta kerugian terhadap kekayaan alam dan kekayaan lain negara-negara, wilayah-wilayah dan bangsa-bangsa itu". (lihat Lampiran 2)

Dalam serangkaian asas mengenai soal-soal perdagangan, Deklarasi menyerukan "suatu hubungan adil dan wajar antara harga bahan-bahan mentah, hasil-hasil primer, barang-barang jadi atau setengah jadi yang diekspor negara-negara berkembang dan harga bahan-bahan mentah, komoditi-komoditi primer, barang-barang jadi, barang-barang modal dan perlengkapan yang mereka impor". Sasarannya ialah melaksanakan suatu perbaikan dalam "terms of trade" yang sejauh itu sangat merugikan negara-negara berkembang dan perluasan ekonomi dunia.

Bagaimana asas-asas itu harus diterapkan dijelaskan secara panjang lebar dalam *Program Aksi*. Salah satu ketentuannya menyerukan agar diambil langkah-langkah untuk mempermudah berfungsinya, organisasi-organisasi produsen, termasuk pemasaran bersama, perdagangan teratur, perbaikan penerimaan ekspor negara-negara berkembang produsen dan dalam "terms of trade", dan pertumbuhan ekonomi dunia. Suatu seksi yang berkaitan menandakan bahwa "pengerahan secara yang semakin efektif oleh kelompok negara pengeksport minyak dari sumber-sumber daya alam mereka demi pembangunan ekonomi mereka harus disambut dengan baik". Selain itu Program Aksi

menyerukan penurunan tarif pengangkutan dan biaya asuransi bagi negara-negara berkembang, lagi pula menandakan bahwa harus diusahakan agar mereka mendapatkan teknologi dengan syarat-syarat yang lebih baik serta penyesuaiannya dengan kondisi khusus masing-masing negara. ¹

Sebagai lanjutan, pada 17-20 Pebruari 1975 kelompok 77 mengadakan suatu konperensi di Aljazair yang dihadiri 66 negara berkembang. Konperensi ini menghasilkan suatu Deklarasi Bersama yang memuat hal-hal berikut: (1) mengenai industrialisasi meningkatkan hasil industri dari 7% menjadi 20-25% seluruh produksi dunia pada tahun 2000, membangun industri dasar dan industri yang mencakup semua tahap produksi yang saling melengkapi; (2) dalam bidang perdagangan meningkatkan devisa dan diversifikasi sumbernya, mendesak negara-negara industri agar menghilangkan hambatan tarif dan nontarif serta menghentikan harga impor yang ditentukan oleh negara-negara industri lewat pasaran bursa; (3) mengenai bantuan asing meningkatkan bantuan keuangan dan teknik tanpa ikatan politik atau ekonomi, serta mendesak perusahaan-perusahaan multinasional agar tidak merugikan negara-negara berkembang; (4) menggalakkan kerjasama langsung antara negara-negara berkembang; dan (5) mengusahakan agar UNIDO di Lima mendesak PBB supaya statusnya diubah menjadi organisasi otonom seperti FAO dan WHO, dan kursi negara-negara berkembang ditingkatkan dari 25 menjadi 40. ²

Langkah berikutnya ialah diadakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada 1-12 September 1975 untuk membicarakan pelaksanaan Tata Ekonomi Internasional Baru. Pada 16 September Sidang mengesahkan suatu rencana menyeluruh untuk membantu negara-negara berkembang dalam krisis ekonomi dunia. Rencana itu menggariskan langkah-langkah untuk memberikan kepada mereka suatu bagian yang lebih baik dan lebih menguntungkan dalam usaha mereka meningkatkan produksi industri dan pertanian. Dia merupakan suatu kompromi

1 Lihat *Sinar Harapan*, 3 Mei 1974; lihat juga ulasan dalam *Survey of Current Affairs*, 4 (1974), hal. 157-159

2 Lihat laporan *Antara*, 20 Pebruari 1975

antara tuntutan minimal negara-negara berkembang dan kesanggupan negara-negara maju untuk menolong tanpa mengorbankan kepentingan-kepentingan dasar mereka. Amerika Serikat, Pasaran Bersama Eropa dan Jepang menerimanya, tetapi mengajukan reservasi-reservasi mengenai sementara langkah. Langkah-langkah itu diterima dalam suatu resolusi, yang memuat pokok-pokok berikut.

1. Mengenai perdagangan internasional "harus dilakukan gabungan usaha-usaha internasional dan nasional menuju perluasan dan diversifikasi perdagangan negara-negara berkembang, perbaikan lewat diversifikasi kapasitas produktif mereka, perbaikan produktivitas mereka dan peningkatan penerimaan ekspor mereka dengan maksud untuk mengatasi akibat-akibat buruk inflasi dan secara demikian mempertahankan pendapatan nyata mereka". Sidang berikut UNCTAD diberi mandat khusus untuk memperbaiki struktur pasaran bahan-bahan mentah dan komoditi yang penting bagi negara-negara berkembang, termasuk cadangan internasional untuk menjamin harga-harga yang mantap, menguntungkan dan adil. UNCTAD juga diminta untuk mempelajari hubungan antara harga-harga ekspor negara-negara industri dan harga bahan-bahan mentah negara-negara berkembang yang dikenal sebagai soal indeksasi harga-harga.
2. Mengenai bantuan pembangunan negara-negara industri hendaknya berusaha sebaik mungkin untuk memindahkan 0,7% GNP mereka ke negara-negara berkembang. Prosentase itu adalah sasaran Dasawarsa Pembangunan II PBB. IMF akan menciptakan tambahan SDR untuk pembangunan dan mengadakan dana trust baru dengan maksud itu, yang sebagian akan dibiayai dengan penjualan emasnya dan sebagian dengan iuran-iuran. Langkah-langkah lain untuk memberikan bantuan keuangan harus dibiayai lewat Bank Dunia dan IMF. Juga perlu dipikirkan penciptaan suatu fasilitas keamanan pembangunan sesuai dengan usul Kissinger untuk "memperlunak berkurangnya penerimaan ekspor negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang paling miskin."
3. Dalam bidang ilmu dan teknologi negara-negara industri hendaknya membantu negara-negara berkembang. "Semua negara harus bekerjasama dalam mengembangkan suatu kode tingkah laku pemindahan teknologi. Negara-negara maju harus membuka pintu mereka selebar mungkin bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan teknologi yang pengalihannya tidak tunduk pada keputusan-keputusan swasta". Suatu konperensi PBB tentang teknologi pembangunan hendaknya diadakan pada tahun 1978 atau 1979.
4. Mengenai industrialisasi UNIDO hendaknya memajukan bantuan dalam proses industrialisasi negara-negara berkembang menurut Rencana Aksi Lima.
5. Mengenai pangan dan pertanian "Pemecahan masalah pangan dunia pertama-tama terletak dalam peningkatan produksi pangan di negara-negara berkembang dengan cepat". Dicantumkan pula usul Amerika Serikat untuk membentuk suatu dana internasional US\$ 1.000 juta untuk pengembangan pertanian dengan target tahunan minimal 10 juta ton pangan.

ANALISA

6. Kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang perlu ditingkatkan.
7. Hendaknya dibentuk suatu komite di mana semua anggota Majelis Umum PBB diwakili untuk menyusun kembali sistem ekonomi.

Wakil Amerika Serikat menandakan bahwa negaranya menyetujui konsensus itu tetapi tidak dapat menerima implikasi bahwa dunia kini mulai menyusun apa yang disebut 'Tata Ekonomi Dunia Baru'. Dalam bidang perdagangan Amerika Serikat tidak dapat menyetujui ditetapkannya harga-harga dunia atau manipulasi "terms of trade". Dia tidak dapat mendukung indeksasi harga-harga.¹

Di atas kertas semuanya itu merupakan suatu hasil yang gemilang, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Sejauh ini ketentuan-ketentuan itu tidak dilaksanakan, khususnya karena ditentang oleh Amerika Serikat, Jerman Barat dan Jepang. Ketiga negara ini berpendapat bahwa tidak diperlukan Tata Ekonomi Dunia Baru karena menurut mereka tata ekonomi yang berlaku sejauh ini adalah baik dan hanya perlu perbaikan di sana sini. Mereka dengan tegas menolak tuntutan negara-negara Dunia Ketiga agar kekayaan dunia dibagi kembali. Pada Sidang UNCTAD IV di Nairobi, 5-31 Mei 1976, yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan resolusi Sidang Khusus Majelis Umum PBB tahun 1975, terjadi perdebatan sengit antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Dengan tegas negara-negara industri menolak konsep yang diajukan oleh negara-negara berkembang untuk menjamin kestabilan harga komoditi-komoditi, yaitu "program komoditi terpadu" (integrated programme for commodities) dan "dana bersama" (common fund). Khususnya mereka menolak indeksasi harga-harga barang-barang ekspor dan impor negara-negara berkembang sebagai manipulasi "terms of trade" yang bertolak belakang dengan ekonomi bebas negara-negara industri. Dengan demikian sidang UNCTAD IV itu dapat dikatakan gagal² Demikianpun Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional yang dilangsungkan di Paris (Desember 1975 — Juni 1977) tidak

1 Lihat ulasan dalam *The New Standard*, 20 September 1975; lihat juga karangan Daniel P. Moynihan, "The United States in Opposition", *Commentary*, Maret 1975

2 Lihat laporan *Sinar Harapan*, 13 Mei 1976 dan *Kompas*, 26 Mei 1976

berhasil memecahkan sengketa itu. Negara-negara industri kaya atau Utara tetap menolak pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru yang diperjuangkan negara-negara berkembang atau Selatan. Mereka tidak bersedia membagi kembali kekayaan dan pendapatan dunia secara yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Mereka sekuat tenaga berusaha mempertahankan sistem ekonomi lama yang sangat menguntungkan mereka dan hanya bersedia mengadakan perubahan-perubahan kecil-kecilan di sana sini. Hal itu dapat dimengerti karena tata baru akan berarti tutupnya banyak pabrik mereka, pengangguran dan menurunnya kemakmuran rakyat mereka.¹

Semuanya itu berarti bahwa neokolonialisme masih sangat kuat di dunia, dan tidak mudah dihancurkan. Akan tetapi negara-negara berkembang Dunia Ketiga telah bertekad untuk meneruskan perjuangan mereka untuk tata dunia baru sampai berhasil. Mereka yakin bahwa bagaimanapun perjuangan itu akhirnya akan berhasil juga, karena dekolonisasi ekonomi adalah suatu proses sejarah yang tidak dapat dibendung.

SIKAP INDONESIA DAN PERANANNYA

Sejak merdeka Indonesia dengan tegas menolak kolonialisme dan imperialisme seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Sikap itu diperkuat dengan penetapan persatuan Indonesia yang seperti ditegaskan oleh Bung Hatta adalah identik dengan nasionalisme sebagai satu di antara lima sila dasar negara. Dengan demikian Indonesia Merdeka tidak hanya dibangun atas dasar nasionalisme tetapi juga wajib ikut memperjuangkannya di forum dunia. Dengan kekuatan-kekuatan anti kolonial lain Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan politik maupun ekonomi segala bangsa dan dalam rangka itu berjuang untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk sistem eko-

1. Tentang kegagalan Dialog Utara-Selatan lebih lanjut lihat Jahangir Amuzegar, "A Requiem for the North-South Dialogue", *Foreign Affairs*, Oktober 1977

ANALISA

nomi internasional ciptaan jaman kolonial yang memeras negara-negara berkembang dengan menguras sumber-sumber daya alam mereka dengan harga murah. Sebagai gantinya Indonesia wajib ikut memperjuangkan pembentukan suatu sistem ekonomi dunia baru yang benar-benar suatu tata atau orde. Oleh sebab itu dalam Pembukaan UUD 1945 juga ditetapkan bahwa pemerintah Indonesia selain mengemban tugas-tugas intern juga wajib "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dengan demikian jauh sebelum Kelompok 77 dibentuk, Pemerintah Indonesia telah ditugaskan untuk memperjuangkan terbentuknya suatu tata dunia baru yang didasarkan atas kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa dan atas keadilan sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara masyarakat dunia dan bangsa-bangsa anggotanya. Sebagai hasilnya akan muncul perdamaian abadi di dunia. Secara demikian sejak permulaan Indonesia juga mengakui dan menegaskan bahwa keadilan sosial bukan saja berlaku dalam negara tetapi juga dalam masyarakat dunia.

Sesuai dengan itu Indonesia tidak hanya berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dinyatakan terhadap usaha negara penjajah untuk menguasainya kembali, tetapi juga ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah baik di forum PBB maupun di forum-forum lain. Antara lain Indonesia ikut menggoalkan deklarasi dekolonisasi PBB tahun 1960 dan resolusi-resolusi anti kolonial yang dikeluarkan oleh PBB untuk melaksanakannya.

Indonesia juga ikut memelopori gerakan Nonblok yang sejak semula menjauhkan diri dari sengketa Timur-Barat dan dengan gigih memperjuangkan dekolonisasi bangsa-bangsa yang masih dijajah secara formal atau dikuasai oleh minoritas-minoritas kulit putih seperti Rhodesia, Namibia dan Afrika Selatan. Kemudian Indonesia ikut membentuk Kelompok 77 yang secara lebih terarah memperjuangkan kemerdekaan ekonomi negara-negara berkembang lewat pembagian kembali kekayaan dunia, perubahan pola hubungan ekonomi global, perbaikan "terms of trade", perubahan sistem pembagian kerja internasional dan lain

sebagainya. Dengan perkataan lain. Indonesia selalu ikut memperjuangkan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru sebagai ganti sistem ekonomi lama ciptaan jaman kolonial.¹

Bangsa Indonesia juga menyadari perlunya mencapai kemerdekaan ekonominya sendiri sesuai dengan tuntutan nasionalisme yang seperti kita lihat di atas merupakan salah satu dasar negaranya. Berdasarkan keyakinan bahwa kemerdekaan ekonomi itu hanya dapat dicapai lewat diversifikasi ekonomi dan industrialisasi, Indonesia melaksanakan suatu rencana pembangunan yang berusaha melakukan keduanya. Dalam GBHN 1978 ditandaskan bahwa dalam Repelita II negara harus "meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku", dalam Repelita III "meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi", dan dalam Repelita IV "meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita berikutnya".² Dengan demikian Indonesia tidak bermaksud untuk membiarkan sistem pembagian kerja internasional lama dan membatasi diri pada produksi dan ekspor komoditi-komoditi primer, tetapi bertekad untuk mengolah sumber-sumber daya alamnya menjadi barang jadi. Sementara itu Indonesia juga ikut memperjuangkan perbaikan "terms of trade" bagi ekspor negara-negara berkembang. Semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari kekayaan alamnya dan secara demikian lambat laun mencapai kemerdekaan ekonomi sejauh hal itu mungkin dalam konteks saling ketergantungan negara-negara di jaman modern ini. Ketergantungan antar negara itu hendaknya bersifat simetris, tidak boleh asimetris. Secara konkrit, Indonesia tidak boleh lebih bergantung pada suatu negara lain daripada ketergantungan negara ini padanya. Ketergantungan yang berlebihan pada suatu negara lain harus dikurangi secara berangsur-ang-

1 Lihat karangan "Sikap Indonesia mengenai Tata Ekonomi Internasional Baru", *Kompas*, 9 Oktober 1975; lihat juga Adam Malik, *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru* (Jakarta, 1976)

2 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1978), 90-91

ANALISA

sur. Dalam rangka itu perlu diadakan diversifikasi impor maupun ekspor.

Agar industrialisasi itu berhasil, bangsa dan negara Indonesia antara lain harus hidup hemat dan menabung untuk ikut membiayainya, lagi pula menghargai barang-barang buatan dalam negeri. Segala pemborosan dan pengeluaran yang belum pada waktunya pada tahap perkembangan ekonomi sekarang ini harus dihindari. Seluruh bangsa harus benar-benar berpegang teguh pada *pola hidup sederhana* yang berulang kali dianjurkan oleh pemerintah.¹ Sehubungan dengan itu pola konsumsi harus diatur dan disesuaikan dengan kemampuan bangsa sebagai keseluruhan. Dia harus dibatasi pada kebutuhan-kebutuhan pokok. Iklan-iklan yang melakukan manipulasi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan mempromosikan barang-barang yang tidak perlu harus dilarang. Demikianpun strategi produksi perlu ditinjau kembali dalam arti bahwa produksi harus lebih diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan rakyat banyak, sedangkan produksi barang-barang yang tidak perlu dibatasi. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian ialah *peningkatan daya beli rakyat banyak*. Usaha industrialisasi tidak akan berhasil kalau daya beli rakyat banyak tidak memadai. Produksi untuk ekspor besar-besaran sukar dilakukan karena menghadapi saingan yang sangat berat, sedangkan pasaran yang terdiri atas golongan elit kecil cepat jenuh. Dengan demikian satu-satunya jalan untuk menggalakkan industri ialah menciptakan pasar dalam negeri dengan meningkatkan daya beli rakyat banyak. Hal ini pada gilirannya menuntut agar prioritas utama diberikan kepada *perluasan kesempatan kerja* yang produktif penuh. Bagi kebanyakan orang kesempatan kerja merupakan satu-satunya sumber pendapatan dan daya beli. Dengan maksud itu alokasi dana untuk perluasan kesempatan kerja perlu ditingkatkan, khususnya karena pengangguran telah mencapai suatu proporsi yang benar-benar menakutkan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa perluasan kesempatan kerja mempunyai kaitan dengan kemerdekaan ekonomi bangsa dan merupakan salah satu tuntutan pokok nasionalisme.

1 Antara lain *Keputusan Presiden* 5 Maret 1974, No. 10/1974 dan Instruksi Presiden 27 Mei 1978 kepada Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, *Kompas*, 29 Mei 1978

Lampiran 1

DEKLARASI DEKOLONISASI MAJELIS UMUM PBB
Resolusi 14 Desember 1960, No. 1514

”Majelis Umum,

Memperhatikan tekad yang dinyatakan oleh rakyat-rakyat dunia dalam Piagam PBB untuk mengukuhkan kepercayaan mereka akan hak-hak asasi manusia, akan harkat dan martabat pribadi manusia, akan persamaan hak pria dan wanita serta bangsa-bangsa besar maupun kecil dan untuk memajukan kemajuan sosial dan taraf-taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar,

Sadar akan perlunya menciptakan kondisi stabilitas dan kesejahteraan serta hubungan-hubungan yang damai dan bersahabat atas dasar hormat terhadap asas-asas persamaan hak dan penentuan diri semua rakyat, dan hormat universal terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa atau agama,

Mengakui adanya aspirasi yang kuat akan kebebasan pada semua rakyat yang bergantung dan peranan menentukan rakyat-rakyat itu dalam perjuangan kemerdekaan mereka,

Sadar akan meningkatnya konflik yang berakar pada penolakan atau hambatan-hambatan terhadap kebebasan rakyat-rakyat itu, yang merupakan suatu ancaman serius bagi perdamaian dunia,

Mengingat peranan penting PBB dalam membantu gerakan kemerdekaan di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja,

Mengakui bahwa rakyat-rakyat dunia sangat menginginkan agar kolonialisme dalam segala manifestasinya diakhiri,

Yakin bahwa terus berlangsungnya kolonialisme mencegah berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, menghambat perkembangan sosial, budaya dan ekonomi rakyat-rakyat jajahan dan bertentangan dengan cita-cita perdamaian universal PBB,

Mengukuhkan bahwa rakyat-rakyat, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat leluasa memakai kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka tanpa merugikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, atas dasar asas saling menguntungkan, dan hukum internasional,

Percaya bahwa proses pembebasan tak dapat ditahan dan bahwa, untuk menghindari krisis-krisis serius, kolonialisme dan segala praktek segregasi dan diskriminasi yang berkaitan harus diakhiri,

Menyambut munculnya pada tahun-tahun belakangan ini sejumlah besar wilayah jajahan ke arah kebebasan dan kemerdekaan, dan mengakui meningkatnya trend-trend yang kuat menuju kebebasan di wilayah-wilayah yang belum mencapai kemerdekaan,

Yakin bahwa semua rakyat mempunyai hak yang tidak dapat dipindahkan atas kebebasan penuh, pelaksanaan kedaulatan mereka dan atas keutuhan wilayah nasional

ANALISA

mereka, *secara khidmat menyatakan* perlunya segera mengakhiri tanpa syarat kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,

Dan dengan maksud itu

Menyatakan bahwa:

1. Penaklukan, penguasaan dan pemerasan rakyat-rakyat oleh kekuasaan asing itu melanggar hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB, dan merupakan suatu hambatan bagi usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia.
2. Semua rakyat mempunyai hak penentuan diri; berdasarkan hak itu mereka leluasa menentukan status politik mereka dan mengusahakan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Kurang memadainya persiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh menjadi dalih untuk menunda kemerdekaan.
4. Segala aksi bersenjata atau segala macam tindakan represif terhadap rakyat-rakyat jajahan harus dihentikan agar mereka dapat melaksanakan hak mereka atas kemerdekaan penuh secara damai, dan keutuhan wilayah mereka harus dihormati.
5. Di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan harus segera diambil tindakan-tindakan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada rakyat-rakyat wilayah-wilayah itu, tanpa syarat atau reservasi apapun, sesuai dengan kemauan dan keinginan mereka yang dinyatakan secara bebas, tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, agar mereka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya.
6. Setiap percobaan yang bertujuan merusak secara parsial atau total kesatuan dan keutuhan wilayah suatu negara adalah tidak selaras dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam PBB.
7. Semua Negara harus melaksanakan secara lengkap dan tepat ketentuan-ketentuan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar persamaan, tidak mencampuri urusan intern semua negara, dan hormat terhadap hak-hak kedaulatan segala rakyat dan keutuhan wilayah mereka."

Diambil dari Ian Browlie, *Basic Documents on Human Rights* (Oxford, 1971), hal. 114-115

Lampiran 2

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Resolusi Sidang Khusus Majelis Umum PBB ke-VI, 3201 (S-VI)

Majelis Umum

Menerima Deklarasi berikut:

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Kami, anggota-anggota PBB,

Setelah mengundang suatu sidang khusus Majelis Umum untuk mempelajari untuk pertama kalinya masalah-masalah bahan-bahan mentah dan pembangunan, yang dimaksud untuk membahas masalah-masalah ekonomi paling penting yang dihadapi masyarakat dunia,

Memperhatikan semangat, tujuan dan asas-asas Piagam PBB untuk memajukan ekonomi dan kemajuan sosial segala bangsa,

Dengan khidmat menyatakan tekad kami bersama untuk bekerja secara mendesak bagi

PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU berdasarkan keadilan, persamaan kedaulatan, interdependensi, kepentingan bersama dan kerjasama antara semua negara, tidak peduli sistem-sistem ekonomi dan sosial mereka, yang akan memperbaiki kepincangan-kepincangan dan membetulkan ketidakadilan-ketidakadilan yang ada, memungkinkan menghilangkan jurang yang melebar antara negara-negara maju dan berkembang dan secara mantap menjamin akselerasi perkembangan ekonomi dan sosial serta perdamaian dan keadilan untuk generasi-generasi sekarang dan mendatang, dan dengan maksud itu menyatakan:

1. Hal paling besar dan paling berarti yang dicapai selama dasawarsa-dasawarsa terakhir adalah kemerdekaan dari dominasi kolonial dan asing bagi sejumlah besar rakyat dan bangsa yang memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat rakyat-rakyat merdeka. Kemajuan teknologi juga dicapai di segala bidang kegiatan ekonomi dalam tiga dasawarsa terakhir, dan secara demikian memberikan suatu potensi yang kokoh untuk memperbaiki kesejahteraan semua rakyat. Akan tetapi sisa-sisa dominasi asing dan kolonial, pendudukan asing, diskrimasi rasial, apartheid dan neokolonialisme dalam segala bentuknya masih tetap merupakan hambatan-hambatan yang paling besar bagi pembebasan dan kemajuan penuh negara-negara berkembang dan semua rakyat yang bersangkutan. Manfaat kemajuan teknologi tidak dinikmati secara adil oleh semua anggota masyarakat internasional. Negara-negara berkembang, yang merupakan 70% penduduk dunia, hanya kebagian 30% pendapatan dunia. Ternyata tidak mungkin mencapai suatu perkembangan yang sama dan berimbang bagi masyarakat internasional dalam tata ekonomi internasional yang ada. Jurang antara negara-negara maju dan berkembang terus melebar dalam suatu sistem yang disusun pada waktu ketika negara-negara berkembang bahkan belum ada sebagai negara merdeka dan yang mengabdikan ketidaksamaan.
2. Tata ekonomi internasional sekarang ini langsung bertolak belakang dengan perkembangan-perkembangan dalam hubungan-hubungan politik dan ekonomi internasional sekarang ini. Sejak 1970 perekonomian dunia mengalami serangkaian krisis berat yang mempunyai reperkusi-reperkusi mendalam, khususnya atas negara-negara berkembang yang umumnya lebih rawan terhadap tekanan-tekanan ekonomi dari luar. Dunia berkembang telah menjadi suatu faktor yang sangat kuat yang pengaruhnya dirasakan di segala bidang kegiatan internasional. Perubahan-perubahan yang tidak dapat dibalik dalam perbandingan kekuatan di dunia ini mengharuskan partisipasi negara-negara berkembang yang aktif, penuh dan sama dalam perumusan dan penerapan segala keputusan yang menyangkut masyarakat internasional.
3. Perubahan-perubahan ini semua telah menonjolkan kenyataan interdependensi semua anggota masyarakat dunia. Kejadian-kejadian sekarang ini dengan tajam menyoroti kesadaran bahwa kepentingan-kepentingan negara-negara maju dan

ANALISA

kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang sudah tidak dapat diasingkan satu sama lain, bahwa terdapat satu kaitan erat antara kemakmuran negara-negara maju dan pertumbuhan serta perkembangan negara-negara berkembang, dan bahwa kemakmuran masyarakat internasional sebagai keseluruhan bergantung pada kemakmuran bagian-bagian komponennya. Kerjasama internasional untuk pembangunan adalah tujuan dan kewajiban bersama semua negara. Dengan demikian kesejahteraan politik, ekonomi dan sosial generasi-generasi sekarang dan mendatang lebih dari sebelumnya bergantung pada kerjasama semua anggota masyarakat internasional atas dasar persamaan kedaulatan dan dihapusnya ketidakseimbangan yang terdapat antara mereka.

4. Tata Ekonomi Internasional Baru itu harus disusun atas dasar hormat penuh terhadap asas-asas berikut:
 - (a) Persamaan kedaulatan negara-negara, penentuan diri semua rakyat, tidak diijinkannya mendapatkan wilayah-wilayah dengan kekerasan, keutuhan wilayah dan tidak mencampuri urusan intern negara-negara lain.
 - (b) Kerjasama seluas mungkin semua negara anggota masyarakat internasional, atas dasar keadilan, di mana perbedaan-perbedaan di dunia sekarang ini dapat disingkirkan dan kemakmuran dijamin untuk semua.
 - (c) Partisipasi penuh dan efektif atas dasar persamaan semua negara dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi dunia demi kepentingan bersama semua negara, sambil memperhatikan perlunya menjamin akselerasi pembangunan semua negara berkembang, secara istimewa memperhatikan agar diambil tindakan-tindakan khusus untuk negara-negara berkembang yang paling terbelakang, terkurung daratan dan terdiri atas pulau maupun negara-negara berkembang yang paling serius menderita akibat krisis-krisis ekonomi dan bencana-bencana alam, tanpa melupakan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang lainnya.
 - (d) Hak setiap negara untuk menganut sistem ekonomi dan sosial yang dirasanya paling cocok untuk perkembangannya dan untuk tidak mengalami diskriminasi apa pun sebagai akibatnya.
 - (e) Kedaulatan permanen penuh setiap negara atas sumber-sumber daya alamnya dan segala kegiatan ekonomi. Untuk menjamin sumber-sumber daya ini setiap Negara berhak untuk melaksanakan penguasaan efektif atasnya dan eksploitasinya dengan sarana-sarana yang selaras dengan situasinya, termasuk hal nasionalisasi atau pemindahan pemilikan kepada warga-warganya, hal mana merupakan ungkapan kedaulatan permanen penuh Negara. Tiada Negara boleh dikenakan paksaan ekonomi, politik atau lain untuk mencegah pelaksanaan bebas dan penuh hak yang tak berpindah ini.
 - (f) Hak semua Negara, wilayah dan rakyat di bawah pendudukan asing, dominasi asing dan kolonial atau *apartheid* atas ganti rugi atau kompensasi penuh bagi eksploitasi dan pengurusan dan pengrusakan sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya lain negara-negara, wilayah-wilayah dan rakyat-rakyat itu.
 - (g) Pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengambil tindakan-tindakan demi kepentingan perekonomian nasional negara-negara di mana perusahaan-perusahaan transnasional itu beroperasi atas dasar kedaulatan penuh negara-negara itu.

NEOKOLONIALISME LAWAN UTAMA

- (h) Hak negara-negara berkembang dan rakyat-rakyat wilayah-wilayah di bawah dominasi kolonial dan rasial serta pendudukan asing untuk mencapai pembedaannya dan mendapatkan kembali penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonominya.
 - (i) Memberikan pertolongan kepada negara-negara, rakyat-rakyat dan wilayah-wilayah berkembang yang di bawah dominasi kolonial dan asing, pendudukan asing, diskriminasi rasial atau *apartheid* atau tunduk pada tindakan-tindakan paksaan ekonomi, politik atau lain yang diambil untuk mendapatkan dari mereka subordinasi pelaksanaan hak kedaulatan mereka dan mendapatkan dari mereka keuntungan jenis apa pun, atau pada neokolonialisme dalam segala bentuknya, dan yang telah berhasil menegakkan atau berusaha untuk menegakkan penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka yang pernah atau masih di bawah kekuasaan asing.
 - (j) Perbandingan adil dan wajar antara harga-harga bahan-bahan mentah, hasil-hasil primer, barang-barang jadi dan setengah jadi yang diekspor negara-negara berkembang dan harga-harga bahan-bahan mentah, komoditi-komoditi primer, barang-barang jadi, barang-barang modal dan perlengkapan yang diimpor oleh mereka dengan maksud untuk mencapai perbaikan yang mantap dalam term of trade mereka yang tidak memuaskan dan dalam perluasan perekonomian dunia.
 - (k) Peningkatan bantuan aktif kepada negara-negara berkembang oleh seluruh masyarakat internasional, bebas dari segala syarat politik atau militer.
 - (l) Menjamin agar salah satu tujuan pokok pembaruan sistem moneter internasional adalah memajukan pembangunan negara-negara berkembang dan arus sumber-sumber daya nyata yang memadai.
 - (m) Meningkatkan daya saing bahan-bahan alam yang menghadapi saingan pengganti sintesis.
 - (n) Perlakuan preferensi tanpa batasan bagi negara-negara berkembang, kapan saja mungkin, di segala bidang kerjasama ekonomi internasional di mana saja mungkin.
 - (o) Mendapatkan syarat-syarat baik untuk pemindahan sumber-sumber daya finansial ke negara-negara berkembang.
 - (p) Memberi negara-negara berkembang akses ke penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan memajukan pemindahan teknologi dan penciptaan teknologi pribumi demi keuntungan negara-negara berkembang dalam bentuk-bentuk dan sesuai dengan prosedur yang cocok untuk perekonomian mereka.
 - (q) Perlunya bagi semua Negara untuk menghentikan pemborosan sumber-sumber daya alam, termasuk hasil-hasil pangan.
 - (r) Perlunya bagi negara-negara berkembang untuk memusatkan seluruh sumber daya mereka bagi pembangunan.
 - (s) Dengan tindakan-tindakan individual dan kolektif meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, keuangan dan teknis antara negara-negara berkembang, terutama atas dasar preferensi.
 - (t) Mempermudah peranan yang mungkin dimainkan oleh perhimpunan-perhimpunan produsen dalam kerangka kerjasama internasional dan, dalam mengejar tujuan-tujuannya, antara lain membantu dalam memajukan pertumbuhan mantap ekonomi dunia dan mempercepat pembangunan negara-negara berkembang.
5. Penerimaan secara unanim Strategi Pembangunan Internasional Dasawarsa Pembangunan Kedua PBB merupakan suatu langkah penting dalam memajukan kerjasama

ANALISA

ekonomi internasional atas dasar yang adil dan wajar. Akselerasi implementasi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen yang diterima oleh masyarakat internasional dalam rangka Strategi itu, khususnya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang yang harus dilakukan, yang akan banyak menyumbang pada pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Deklarasi ini.

6. PBB sebagai suatu organisasi universal harus mampu menangani masalah-masalah kerjasama ekonomi internasional secara menyeluruh dan secara sama menjamin kepentingan-kepentingan semua negara. Dia harus memainkan peranan yang bahkan lebih besar dalam pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru. Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara, yang persiapannya akan mendapatkan ilham tambahan dari Deklarasi ini, akan merupakan suatu sumbangan yang berarti dalam hal ini. Semua negara anggota PBB oleh sebab itu diminta agar melakukan usaha maksimal untuk menjamin implementasi Deklarasi ini, yang merupakan salah satu jaminan utama bagi terciptanya kondisi yang lebih baik untuk semua rakyat guna mencapai suatu kehidupan yang layak bagi martabat manusia.
7. Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru ini harus merupakan salah satu dasar yang paling penting untuk hubungan-hubungan ekonomi antara semua rakyat dan semua bangsa.

Sidang Pleno ke-2229, 1 Mei 1974



INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL

Diterbitkan setiap tahun oleh CSIS; memuat ringkasan peristiwa dalam negeri dan dunia internasional. Buku ini penting sekali untuk referensi dan dokumentasi bagi para petugas pemerintahan, mahasiswa, sarjana maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang ingin mendalami permasalahan yang dihadapi di Indonesia khususnya dan dalam dunia internasional pada umumnya. Masih tersedia:

Indonesia dan Dunia Internasional 1974 a Rp. 1.750,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1975 a Rp. 4.000,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1976 a Rp. 5.000,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1977 a Rp. 5.000,-
Indonesia dan Dunia Internasional 1978

Pesanan luar kota tambah ongkos kirim 15%